



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**



**TAHUN ANGGARAN 2006**



## PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2006

#### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2006.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokol dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

perhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



Deagan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
DAN  
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

(a) PENDAPATAN	Rp. 870.274.000.000,00
(b) BELANJA	<u>Rp. 580.500.000.000,00</u>
Surplus (Defisit)	Rp.289.774.000.000,00
(c) PEMBIAYAAN :	
1. Penerimaan Daerah	Rp. 206.361.579.283,00
2. Pengeluaran Daerah	<u>Rp.(496.135.579.283,00)</u>
Jumlah	Rp.(289.774.000.000,00)

Pasal 2

Fenjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas sudah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah.
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah.
7. Lampiran VII : Daftar Investasi Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap.
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan Daerah.
10. Lampiran X : Rekapitulasi Belanja Menurut Kewenangan, Unit Organisasi, Program, dan Kegiatan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Natuna menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 17 Mei 2006



Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 17 Mei 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR ...5

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
TAHUN ANGGARAN 2006**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>870,274,000,000.00</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3,068,899,600.00</b>
1.01.	Pajak Daerah	1,170,000,000.00
1.02.	Retribusi Daerah	398,899,600.00
1.03.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,100,000,000.00
1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	400,000,000.00
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>863,705,100,400.00</b>
2.01.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	711,621,100,400.00
2.02.	Dana Alokasi Umum	147,584,000,000.00
2.04.	Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan di Propinsi	4,500,000,000.00
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>3,500,000,000.00</b>
3.01.	Bantuan Dana dari Pemerintah Pusat	3,500,000,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>870,274,000,000.00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>580,500,000,000.00</b>
<b>1.</b>	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>209,461,375,285.00</b>
<b>1.</b>	<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>130,670,369,134.00</b>
1.01.	Belanja Pegawai/Personalia	67,200,925,134.00
1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	40,714,984,000.00
1.03.	Belanja Perjalanan Dinas	17,247,460,000.00
1.04.	Belanja Pemeliharaan	5,507,000,000.00
<b>2.</b>	<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>53,644,273,351.00</b>
2.01.	Belanja Pegawai / Personalia	5,206,608,000.00
2.02.	Belanja Barang dan Jasa	41,403,128,351.00
2.03.	Belanja Perjalanan Dinas	6,944,537,000.00
2.04.	Belanja Pemeliharaan	90,000,000.00
<b>3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22,396,732,800.00</b>
3.01.	Belanja Modal Tanah	8,639,215,000.00
3.04.	Belanja Modal Instalasi	1,322,000,000.00
3.06.	Belanja Modal Bangunan Gedung	4,982,141,000.00
3.07.	Belanja Modal Monumen/Bangunan Bersejarah/Tugu/Rambu-rambu	289,500,000.00
3.09.	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	690,000,000.00
3.10.	Belanja Modal Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	41,000,000.00
3.12.	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4,989,123,300.00
3.13.	Belanja Modal Alat-alat studio dan Alat-Alat Komunikasi	659,766,900.00
3.15.	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	433,995,100.00
3.16.	Belanja Modal Buku/Perpustakaan	62,500,000.00
3.17.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	237,491,500.00
3.21.	Belanja Modal Lainnya	50,000,000.00
<b>4.</b>	<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>2,750,000,000.00</b>
4.07.	Belanja Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penguatan Kemitraan Daerah	2,750,000,000.00
<b>2.</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>371,038,624,715.00</b>
<b>1.</b>	<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>104,176,734,171.00</b>
1.01.	Belanja Pegawai/Personalia	85,875,104,171.00
1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	12,363,130,000.00
1.03.	Belanja Perjalanan Dinas	4,580,000,000.00
1.04.	Belanja Pemeliharaan	1,358,500,000.00
<b>2.</b>	<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>51,050,718,629.00</b>
2.01.	Belanja Pegawai / Personalia	3,499,785,500.00
2.02.	Belanja Barang dan Jasa	40,980,711,399.00
2.03.	Belanja Perjalanan Dinas	5,907,791,000.00
2.04.	Belanja Pemeliharaan	662,430,730.00
<b>3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150,781,680,540.00</b>
3.01.	Belanja Modal Tanah	716,489,500.00
3.02.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	64,426,207,138.00
3.03.	Belanja Modal Rangunan Air (Irigasi)	21,866,450,000.00
3.04.	Belanja Modal Instalasi	575,361,500.00
3.05.	Belanja Modal Jaringan	1,752,000,000.00



NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3.06.	Belanja Modal Bangunan Gedung	53,473,662,642.00
3.07.	Belanja Modal Monumen/Bangunan Bersejarah/Tugu/Rambu-rambu	371,000,000.00
3.09.	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	1,966,600,000.00
3.11.	Belanja Modal Alat-alat Pertanian	75,000,000.00
3.12.	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	997,688,000.00
3.13.	Belanja Modal Alat-alat studio dan Alat-Alat Komunikasi	124,200,000.00
3.14.	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	1,177,902,960.00
3.15.	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	50,000,000.00
3.16.	Belanja Modal Buku/Perpustakaan	300,000,000.00
3.18.	Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman	390,038,800.00
3.19.	Belanja Modal Alat-alat Perserajaan/Keamanan	2,780,000.00
3.21.	Belanja Modal Lainnya	1,222,000,000.00
3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan	1,294,300,000.00
<b>4.</b>	<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>62,029,491,375.00</b>
4.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	5,600,000,000.00
4.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	15,125,000,000.00
4.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat	16,605,000,000.00
4.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi & Kegiatan	2,500,000,000.00
4.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Parpol dan Pelaksana Pemilu	13,574,491,375.00
4.06.	Belanja Bantuan Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan	3,125,000,000.00
4.07.	Belanja Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Daerah	5,500,000,000.00
<b>5.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	<b>3,000,000,000.00</b>
5.01.	Belanja Tidak Tersangka	3,000,000,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>580,500,000,000.00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>289,774,000,000.00</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>(289,774,000,000.00)</b>
<b>1.</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>206,361,579,283.00</b>
1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	206,361,579,283.00
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>(496,135,579,283.00)</b>
2.02.	Penyertaan Modal	(14,000,000,000.00)
2.03.	Pembayaran Utang	(13,500,000,000.00)
2.04.	Sisa Anggaran Tahun Berjalan	(468,535,579,283.00)
2.05.	Bantuan Dana Bergulir	(100,000,000.00)
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(289,774,000,000.00)</b>